

TESIS
TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN
SALAH SATU PIHAK DALAM PEMBUATAN
AKTA JUAL BELI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan
Nomor :228/Pid.B/2018/PN Plw)

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (MKn)



Oleh :

ADE ANDRIANI PRATAMA
NIM 1920123039

Pembimbing :

1. Dr. SUKANDA HUSIN, SH., LLM
2. Dr. MUHAMMAD. HASBI, SH., MH

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN
2023

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN
SALAH SATU PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN
Plw)**

Ade Andriani Pratama, NIM 1920123039, Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2023, 136 halaman

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Hal ini diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam membuat akta PPAT dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN Plw, dimana PPAT melakukan pemalsuan tanda tangan salah satu pihak. Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap **akta yang dibuatnya**, kedua **Bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** jika adanya pemalsuan tanda tangan oleh salah satu pihak dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah, dan ketiga Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :228/Pid.B/2018/PN Plw. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif dengan menggunakan data sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian Tanggung jawab PPAT yang terbukti bersalah secara perdata dapat digugat karena perbuatannya melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan secara administrasi dapat dikenakan sanksi yaitu teguran. Sedangkan tanggungjawab pidana PPAT telah terbukti secara sah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP maka dikenakan sanksi pidana penjara 3 (tiga) bulan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim menitikberatkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh PPAT dan terbukti bersalah sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang bisa membuat dihapuskan pidana terhadap terdakwa Notaris/PPAT

Kata Kunci: Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pemalsuan Tanda Tangan, Akta Jual Beli.

**RESPONSIBILITY OF LAND DEED MAKER (PPAT)
DUE TO FORGERY OF SIGNATURE
ONE OF THE PARTIES IN MAKING A SALE AND PURCHASE DEED
(Study of Pelalawan District Court Decision Number: 228/Pid.B/2018/PN Plw)**

*Ade Andriani Pratama, NIM 1920123039, Postgraduate Master of Kenotariatan
Study Program, Faculty of Law, Andalas University Padang, 2023, 136 pages*

ABSTRACT

The Land Deed Official is an official who is authorized to make an autetic deed. This is regulated in the Notary Position Law Number 2 of 2014, Government Regulation Number 24 of 2016 concerning the Regulation of Land Deed Officials In making a deed PPAT can be held accountable if there are elements of unlawful acts, as happened in the Pelalawan District Court Decision Number: 228/Pid.B/2018/PN Plw, where the PPAT falsified the signature of one of the parties. In this study there are 3 (three) problem formulations, namely: First, How is the legal regulation of the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) for the deed he made, second How is the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) if there is a forgery of signatures by one of the parties in the making of a land sale and purchase deed, and third What is the consideration of the Panel of Judges in the Pelalawan District Court Decision Number: 228/Pid.B/2018/PN Plw. This research uses the Normative Method using secondary data and 3 (three) primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, the responsibility of PPATs who are proven guilty in civil law can be sued because their actions are against the law based on Article 1365 of the Civil Code by parties who feel harmed and administratively can be subject to sanctions, namely reprimands. While the criminal responsibility of PPAT has been proven to legally violate Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code, it is subject to imprisonment of 3 (three) months. The reasoning of the Panel of Judges focuses on the criminal act committed by the PPAT and is proven guilty so that there is no justification or excuse that can make the criminalization of the Notary / PPAT defendant waived.

Keywords: Responsibility of Land Deed Official (PPAT), Forgery of Signature, Sale and Purchase Deed.